

# PEMBAHARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

# SPI

## SERIKAT PETANI INDONESIA

### Dari federatif ke kesatuan



# Bersatu kita kuat!

Perubahan politik di Indonesia sejak Mei 1998 menjadi titik tolak perubahan dalam sistem politik dan mekanisme pengambilan keputusan negara. Namun dirasakan perubahan tersebut tak mendasar, hanyalah terlihat pada proses demokrasi prosedural. Seperti pemilihan langsung presiden maupun kepala daerah, adanya lembaga Dewan Perwakilan Daerah, banyaknya partai politik yang tumbuh. Seiring dengan perubahan politik itu tumbuhnya berbagai organisasi petani, buruh dan lembaga swadaya masyarakat juga gerakan mahasiswa yang diluar mainstream. Tak tertinggal juga pers yang lebih bebas.

Kejatuhan rezim Soeharto membuka jalan terbuka bagi kaum tani untuk berorganisasi dan melakukan perjuangan gerakan tani. Hal yang pokok adalah mendesak dilaksanakannya reforma agraria di Indonesia. Maka terjadilah banyak konsolidasi gerakan tani yang makin menguat dan mengarah kepada pembentukan suatu organisasi tani yang berskala nasional. Walau sebenarnya cikal bakal lahirnya organisasi kaum tani berskala nasional ini sudah dimulai sejak awal tahun 1980-an. Berbagai pertemuan antar kelompok petani, aktivis mahasiswa dan pemuda digelar, salah satu hasilnya adalah terbentuknya forum-forum diskusi untuk meng-analisis kasus-kasus pertanahan.

Tatkala Soeharto tumbang, banyak aktivis dan penggerak pembangunan ormas tani mulai tak begitu bergairah. Kebanyakan cenderung memilih jalan aktivitas politik maupun membentuk lembaga swadaya masyarakat. Ditengah situasi politik yang terbuka serta tuntutan ormas tani yang bersifat wilayah agar segera dibentuk ormas tani nasional, maka pada tanggal 8 Juli 1998, di deklarasikan Pendirian Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di desa Loburapa, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Dapat dikatakan bahwa cikal bakal lahirnya ormas tani nasional disatukan kerana persoalan konflik agraria terutama perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lahan pertanian.

Kini sudah sembilan tahun lamanya atau semenjak

dideklarasikannya FSPI pada tanggal 8 Juli 1998, kita berjuang. Selama periode waktu itulah, kita bisa merasakan dan menilai bagaimana kerasnya perjuangan melaksanakan reforma agraria dan atas kebijakan pembaruan agraria pemerintah. Namun ternyata perjuangan kita belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, kemudian muncul beberapa kebijakan pemerintah yang justru lebih membuat jalan FSPI semakin terjal dan mendaki. Hal ini dapat kita lihat makin banyaknya kasus konflik agraria di Indonesia yang belum tersentuh apalagi terselesaikan. Yang kita hadapi sekarang ini juga kebijakan tentang penanaman modal, pengembangan bahan bakar nabati, dan pembangunan infrastruktur untuk menyebut beberapa contoh kebijakan pemerintah. Setelah sebelumnya massa tani FSPI dihipit dan ditindas oleh kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air, tanah, perkebunan, kehutanan, kenaikan harga bahan bakar dan pasar bebas.

Dari analisa dan perkembangan kerja yang telah dilakukan oleh FSPI ada beberapa faktor eksternal yang semakin penuh tantangan dan berbahaya. Sekarang ini diperlukan suatu organisasi yang luwes, cepat dan tepat dalam bergerak dan mengambil keputusan, terampil. Pondsasi dan irama kerja federasi ternyata tidak cukup kuat dalam melakukan gerakan perlawanan.

Atas dasar itu FSPI diarahkan bergerak maju dari bentuk yang federasi menuju organisasi perjuangan kaum tani yang berbentuk kesatuan/unitaris. Dengan demikian kita arahkan pelbagai perbaikan dalam fondasi dan irama kerja sebagai ormas tani yang kuat.

Maka pada tanggal 2-5 Desember 2007, pada kongres yang ke-3, FSPI mendeklarasikan perubahan bentuk dan nama organisasi. Kini struktur organisasinya unitaris dengan nama Serikat Petani Indonesia disingkat SPI. Go a head SPI!



**Penanggung Jawab:** Henry Saragih  
**Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad  
**Pemimpin Redaksi:** Achmad Ya'kub;  
**Dewan Redaksi:** Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;  
**Redaktur Pelaksana:** Cecep Risnandar  
**Redaktur:** Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;  
**Reporter:** Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat),

Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moe (NTT).

**Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni

**Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;

**Penerbit:** Serikat Petani Indonesia (SPI)

**Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id website: www.spi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

## DAFTAR ISI

Serikat Petani Indonesia Dari Federatif ke Kesatuan	3
KONGRES III FSPI 5000 petani meriahkan pembukaan kongres	4
Galeri Foto Kongres III FSPI	6
Catatan Akhir Tahun SPI	8
Petani Melawan Pemanasan Global	10

## Catatan dari Ketua Umum Dari federatif ke kesatuan

*Sudah sembilan tahun lamanya atau semenjak dideklarasikannya FSPJ pada tanggal 9 Juli 1998, kita berjuang. Selama periode waktu itulah, kita bisa merasakan dan menilai bagaimana bagaimana kerasnya perjuangan agraria kaum tani terhadap kebijakan pembaruan agraria pemerintah.*

*Namun ternyata perjuangan kita belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, kemudian muncul beberapa kebijakan pemerintah yang justru lebih membuat jalan organisasi kita semakin terjal dan mendaki.*

*Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus sengketa agraria di Indonesia yang belum tersentuh untuk segera diselesaikan, oleh karena kebijakan tentang penanaman modal, pengembangan bahan bakar nabati, dan pembangunan infrastruktur untuk menyebut beberapa contoh kebijakan pemerintah pada saat ini. Setelah sebelumnya massa tani FSPJ dihimpit dan ditindas oleh kebijakan*

*pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air, tanah, perkebunan, kehutanan, kenaikan harga bahan bakar dan pasar bebas.*

*Dengan tidak menafikan adanya faktor eksternal yang semakin berbahaya, kelemahan FSPJ dalam menghadapi segala tantangan yang disebut di atas adalah akibat dari bentuk organisasi kita yang Federasi tersebut. Pondasi dan irama kerja federasi ternyata tidak cukup kuat dalam melakukan gerakan perlawanan.*

*Atas dasar itu, pada kongres III FSPJ di Wonosobo, FSPJ mengubah struktur dan nama organisasi menjadi organisasi berbentuk kesatuan dengan nama Serikat Petani Indonesia disingkat SPI.*

*Ketua Umum SPI  
Henry Saragih*



Penggantian papan nama dari FSPJ menjadi SPI di sekaligus menjadi peresmian kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC-SPI) Wonosobo di Kabupaten Wonosobo, 5 Desember 2007.

## KONGRES III FSPI

## Ribuan petani hadir

Lebih dari 5000 petani yang tergabung dalam Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) memeriahkan pembukaan kongres III FSPI yang digelar di Kompleks Adipura, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (2/12). Perwakilan petani tersebut datang dari berbagai serikat tani anggota FSPI dari 12 propinsi.

Di antaranya Serikat Petani Sumatera Utara, Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB), Persatuan Petani Jambi, Serikat Petani Sumatera Selatan, Serikat Petani Lampung, Serikat Tani Nusa Tenggara Barat dan Serikat Petani Sikka-NTT (SPKS).

Pejabat pemerintah yang hadir antara lain Dirjen SDM Departemen Pertanian Atro Suprpto, Staf Khusus Gubernur Jateng Frans Sinaga, Bupati Wonosobo Kholiq Arif, Wakil Bupati Munthohar MM, pimpinan SKPD. Selain itu, hadir juga perwakilan dari

PBNU dan Dr Revrison Baswir akademisi UGM. Kegiatan yang dimeriahkan dengan parade drum band dan pentas kesenian rakyat itu berlangsung hingga 5 Desember mendatang.

Rangkaian kongres selanjutnya yakni tanggal 3-5 digelar di Pondok Pesantren Al Mubarakh, Manggis, Wonosobo.

Tanah untuk rakyat!

Pada kesempatan itu, petani FSPI menuntut Presiden segera mewujudkan janjinya untuk mewujudkan pembaharuan agraria seluas 9,2 juta hektar. Tanah seluas itu akan sangat berguna bagi petani untuk mengembangkan pertanian dan usaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Jika tidak, selamanya petani di Indonesia akan menjadi kuli karena

posisi petani di Indonesia pada era perdagangan bebas ini semakin terimpit oleh desakan perusahaan-perusahaan multinasional.

Kesejahteraan petani juga tidak membaik meskipun kini hasil pertanian menjadi rebutan untuk kebutuhan bahan baku industri minyak diesel di pasar internasional dan cadangan pangan negara.

Dalam orasinya, Sekjen FSPI Henry Saragih mengatakan, penguasaan lahan oleh petani kian berkurang. Pada era 1980-an, rata-rata petani masih memiliki lahan seluas hampir satu hektar, tetapi kini rata-rata hanya 0,5 hektar. "Jumlah petani gurem juga meningkat hingga 2,6 persen, mencapai 13,7 juta petani," katanya.

Konflik lahan pertanian di Indonesia pun semakin banyak. Berdasarkan data Badan Pertanahan Negara, kata Henry, paling tidak ada



Susana pembukaan kongres di dalam Gedung Adipura

# Pembukaan Kongres



Mugji Ramanu

Henry Saragih

Ahmad Somaeri

8.000 konflik tanah akibat rebutan lahan pertanian antara petani dengan pengusaha asing.

"Di Bulukamba, di Sumatera, enam petani tewas akibat konflik pada tahun 2003 dengan PT London Sumatera. Terakhir adalah peristiwa Alastlogo, empat petani tewas ditembak TNI AL karena mempertahankan lahan pertaniannya," katanya.

Tak hanya persaingan untuk rebutan lahan pertanian, petani juga harus bersaing dengan kepentingan-kepentingan perusahaan multinasional, terutama untuk usaha perkebunan. "Selama 10 tahun, petani bersatu dalam FSPI, tekanan kepentingan perusahaan multinasional ini masih sulit dibendung," katanya.

Ditambah lagi, katanya, belakangan ini sejumlah komoditas pertanian ikut menjadi komoditas utama pasar internasional, terutama untuk bahan baku minyak diesel sehingga harganya juga dikendalikan pasar internasional.

"Sebaliknya, petani tetap tak bisa berbuat apa-apa, kesejahteraannya

juga tak meningkat meskipun kedelai dan jagung yang dijadikan bahan baku biodiesel itu sudah menjadi barang mahal di pasar internasional," kata Henry.

Henry menambahkan, "kami mendesak kepada SBY-JK untuk segera merealisasikan reformasi agraria. Jika ini dilakukan maka bisa menolong 3 juta KK atau sekitar 12 juta jiwa warga miskin atau sepertiga dari jumlah angka miskin di Indonesia. Dengan reformasi agraria akan terbuka lapangan pekerjaan, pemanfaatan lahan secara baik, menghindari kerusakan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

#### Persatuan Kaum Tani

Kongres II FSPI yang mengusung tema *Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional untuk mewujudkan pembaruan agraria dan kedaulatan rakyat menuju keadilan sosial* itu berhasil mengubah bentuk organisasi FSPI dari federatif menjadi kesatuan. Selain itu, nama FSPI berganti menjadi Serikat Petani Indonesia disingkat SPI.

Panitia paniti pelaksana kongres

yakni Serikat Petani Jawa Tengah (SP Jateng), mengaku bangga dengan suksesnya kongres II FSPI ini. Kini, nama SP Jateng berubah ikut berubah juga menjadi menjadi DPW SPI Jawa Tengah

Menurut Ketua Serikat Petani Jawa Tengah (SPJT), Ahmad Somaeri, kongres ini dilakukan untuk mempersatukan organisasi tani agar memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Saat ini para petani dihadapkan pada persoalan yang belum memihak mereka, sehingga diperlukan persatuan yang kuat dalam bentuk organisasi kesatuan.

Hal senada di ungkapkan oleh Ketua Majelis Pimpinan Tertinggi Petani (MPTP) FSPI Mugji Ramanu, untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembaruan agraria diperlukan sebuah organisasi petani yang kuat dan solid. "Kesatuan organisasi kaum tani sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi petani untuk mewujudkan cita-citanya," ujarnya.



1

1. Pembukaan Kongres III FSPI di Gedung Adipura, Wonosobo
2. Pentas kesenian rakyat, di halaman Gedung adipura
3. Perwakilan petani dan Departemen Pertanian membuka kongres secara seremonial
4. Sekitar 5000 perwakilan petani menyimak orasi-orasi pada pembukaan kongres
5. Delegasi peserta kongres berfoto bersama
6. Sekjen FSPI Henry Saragih memberikan orasi politik



2



3



4



5



6



7



8

- 6. Majelis Pimpinan Tertinggi Petani (MPTP) memimpin persidangan awal dalam kongres III FSPI di Pesantren Al Mubarakh, Wonosobo
- 7. Suasana rapat-rapat pleno membahas perubahan AD/ART
- 8. KH Machfud (pimpinan pondok pesantren Edi Mancor) dan KH Nur Hodayat (pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarakh) memberikan sambutan kepada peserta kongres III FSPI
- 10. Ketua MPTP Mugi Ramanu secara simbolis menyerahkan kepemimpinan sidang kongres III kepada pemimpin sidang terpilih M Yunus dari Sumatera Utara
- 11. Majelis Nasional Petani (MNP) terpilih dan yang mewakilinya berfoto bersama sesaat setelah pemilihan MNP pada rapat pleno kongress III FSPI.



9



10



11

## CATATAN AKHIR TAHUN 2007

# SBY-JK Tidak Laksanakan Pembaruan Agraria: Indonesia Terus Menderita Konflik Agraria dan Rawan Pangan

### Pendahuluan

Sepanjang tahun 2007, secara umum kondisi kaum tani di Indonesia tidak berubah banyak dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan yang mencapai 16.58 persen—walaupun turun dari tahun 2006 sebanyak 17.75 persen—tidak merepresentasikan kondisi di lapangan. Nyatanya, sejumlah 63.52 persen dari total orang miskin tersebut adalah rakyat yang tinggal di desa, yang mayoritasnya (70 persen) adalah kaum tani.

Pembangunan RI di tahun 2007 juga tidak kunjung memprioritaskan pertanian. Paradigma pemerintah tetap mengandalkan sektor industri dan jasa, dan jelas sangat tergantung pada investasi, perdagangan saham, dan utang. Per November 2007 porsi investasi asing di Indonesia sudah mencapai 74 persen, yang diwakili sekitar 200 perusahaan transnasional. Fenomena ini juga yang 'menyerempet' bahaya di sektor pertanian, bisa terlihat jelas di sektor perkebunan, terutama komoditi kelapa sawit.

Sebenarnya ada harapan besar bagi petani ketika ada program nasional yang dicanangkan SBY-JK pada 11 Juni 2005 berupa program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Kemudian disusul dengan pengumuman pemerintah pada 28 September 2006 yang menyatakan akan melaksanakan pembaruan agraria dengan menyediakan lahan seluas 8,15 juta hektar via Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Bahkan, janji pelaksanaan pembaruan agraria diperkukuh melalui pidato Presiden SBY pada 31 Januari 2007.

Namun kini, semua janji presiden dan Jusuf Kalla itu hanya tinggal janji. Semuanya tidak dilaksanakan.

### Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perdagangan

Dari rekaman dan analisis yang dilakukan oleh Serikat petani Indonesia, terdapat berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang

semangatnya bukanlah untuk kesejahteraan dan membangun pertanian nasional namun justru berpihak kepada pemodal dan investasi. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan pemerintah untuk kembali mengimpor pangan dicatat dalam beberapa fakta, yaitu naiknya impor beras 1.5 juta ton beras di tahun 2007. Ini naik dari tahun 2006 yang hanya sebesar 840 ribu ton (atau naik 78.5 persen). Dalam komoditi kedelai, mengimpor 1.5 juta ton kedelai di tahun 2007. Ini naik dari tahun 2006 yang sebesar 1.2 juta ton (atau naik 25 persen). Untuk memudahkan impor beras diujung tahun 2007 pemerintah melalui Menkeu menetapkan penurunan tarif BM atas impor beras sebesar Rp. 100, menjadi Rp. 450 yang sebelumnya sebesar Rp. 550.

Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari perdagangan pertanian yang diatur oleh WTO. Sudah lama kaum tani di Indonesia kesusahan akibat liberalisasi perdagangan (penghapusan subsidi domestik nasional, penghapusan pajak ekspor, penghapusan tarif masuk) ala WTO.

Selain masalah impor pangan, isu kedaulatan pangan pada tahun 2007 adalah tetap isu rawan pangan. Dari total 349 kabupaten di Indonesia, terjadi rawan pangan pada 100 kabupaten. Di antara 100 kabupaten tersebut, 30 kabupaten dinyatakan kronis dan 60 cukup rawan.

Kedua, mulai tahun 2006, krisis bahan bakar fosil dan isu lingkungan membuat isu Bahan Bakar Nabati (BBN) naik yang artinya ditahun 2008 ini kawasan perkebunan kelapa sawit akan semakin meluas. BBN, kami sebutkan sebagai agrofuel—bukan biofuel—karena prefiks 'bio' belum tentu menjamin agrofuel ini hijau, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebaliknya, mode produksi yang menyertai agrofuel ini adalah masif, monokultur, ekspansif dan export-

oriented sehingga sangat membahayakan rakyat sekaligus lingkungan.

Pada tahun 2006 juga, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden tentang Bahan Bakar Nabati (BBN). Perpres ini pun efektif berjalan seiring naiknya isu agrofuel. Akibatnya, kini banyak terjadi salah kaprah di tengah pemerintah dan rakyat. Pemerintah mendorong rakyat berbondong-bondong menanam komoditas agrofuel, ditambah penanaman modal yang cukup besar juga di sektor ini.

Komoditas-komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, singkong, jagung sekarang ditanam untuk agrofuel. Akibatnya adalah naiknya harga minyak goreng sepanjang tahun 2007 yang mencapai 35%, kerusakan lingkungan yang makin meluas, dan potensi pengrusakan yang menambah konflik agraria di pedesaan. Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat betapa ekspansifnya perluasan kebun kelapa sawit yang saat ini mencapai 6 juta ha lebih.

Ketiga, medio 2007, pemerintah mengesahkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sejak digodok, UU ini telah menuai banyak protes dari gerakan rakyat. Lebih lanjut, substansi di dalam UU ini akhirnya digugat oleh SPI bersama gerakan rakyat lainnya yang tergabung dalam GERAK LAWAN. Hingga saat ini proses mengadili UU ini (atau disebut judicial review) masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan sudah mencapai tiga kali persidangan.

UU ini antara lain digugat karena bertentangan dengan UUD 1945 yaitu : Pasal 2, Pasal 6 Pasal 7, dan yang berhubungan langsung dengan agraria adalah Pasal 19 (pemerintah akan memberi kemudahan bagi investor untuk memperoleh hak atas tanah), serta Pasal 20 (HGU 95 tahun, HGB 80 tahun, dan HP 70 tahun). Undang-

Undang ini berpotensi menambah konflik agraria.

Serikat Petani Indonesia (SPI) juga mencatat banyak kebijakan lainnya yang menyebabkan kekerasan (judicial violence) terhadap petani yaitu UU 7/2004 tentang sumberdaya air, UU 18/2004 tentang Perkebunan, UU Pertambangan serta perpres 36/2005 direvisi menjadi perpres 65/2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dan sekarang ini pemerintah dengan DPR RI sedang menyusun RUU tentang Lahan Pertanian Pangan Abadi yang arahnya belum jelas. Dapat disimpulkan bahwa banyak kebijakan agraria yang kontradiktif dengan pencapaian pembaruan agraria yang dimandatkan UUPA 1960.

Inkonsistensi pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan juga terlihat dengan rendahnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini. Pada tahun 2007, anggaran untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan hanya seperdelapan dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran utang yang mencapai 85.1 triliun rupiah.

**Konflik Agraria dan Hak asasi petani**

Selama tahun 2007 tercatat lebih dari 76 kasus konflik agraria terjadi, bahkan sebagian besar masih merupakan kasus lama. Lebih dari 196.179 Ha lahan rakyat dirampas sehingga tidak bisa bertani di atas lahan tersebut. Lebih dari 166 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. belum lagi lebih dari 24.257 KK petani yang tergusur dari tanahnya dan mengalami pelanggaran HAM. 8 orang tercatat tewas dalam konflik. Dari banyak korban konflik 12 orang diantaranya tercatat mengalami luka tembak. Data ini semua hanyalah data dari anggota SPI dan jaringan serta yang berhasil dikumpulkan, lebih dari itu banyak konflik dan korban yang masih tertutup informasinya dari publik.

Secara umum konflik agraria terjadi di wilayah perkebunan dan kehutanan contohnya seperti: Perkebunan, salah satunya yang terjadi pada anggota SPI Sumatera utara di Kabupaten Asahan, tepatnya di Bandar Pasir Mandoge. Konflik Petani dengan PT. BSP (Bakrie Sumatera plantation) telah berlangsung

sejak tahun 1981 namun hingga kini kasus tersebut tidak pernah selesai, tidak terhitung lagi penangkapan dan tindak kekerasan yang diterima petani, terakhir pada 7 Juni 2007 salah seorang tokoh petani ditangkap.

Kehutanan, Dalam konteks ini petani sering dituduh menyerobot wilayah hutan, padahal dalam banyak kasus justru petanilah yang diserobot lahannya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Cibaliung di Propinsi Banten, tanah rakyat justru dirampas Perhutani, meski petani memiliki bukti kepemilikan yang sah hal tersebut tidak menutup tindak kekerasan yang terjadi pada petani.

Konflik kehutanan juga muncul di wilayah konservasi hutan atau hutan suaka, padahal rakyat lebih lama tinggal di kawasan tersebut. Seperti yang terjadi dalam kasus TNUK (Taman Nasional Ujung Kulon) di Propinsi Banten petani dipaksa pindah dari tempat tinggalnya karena daerahnya ditetapkan sebagai taman nasional. Konflik yang berkepanjangan itu menimbulkan korban satu orang tewas tertembak pada 2006 yang mengakibatkan kemarahan petani sehingga timbul konflik, buntut dari konflik tersebut pada 23 Mei 2007 lima orang petani di kawasan TNUK ditangkap.

Selain itu dalam banyak konflik agraria tidak jarang petani berhadapan dengan aparat negara, baik TNI maupun POLRI, bahkan dalam beberapa kasus konflik agraria yang terjadi langsung berhadapan dengan aparat. Seperti yang terjadi dalam bentrok antara AL dan petani di desa Alas Tlogo, Pasuruan Jawa Timur pada 30 Mei 2007 yang mengakibatkan 3 orang tewas tertembak dan 8 lainnya mengalami luka akibat tembakan. Konflik tersebut bermula dari sengketa lahan seluas 3.569 Ha yang diklaim sebagai milik AL dan digunakan sebagai pusat latihan tempur. Kasus serupa juga terjadi pada Januari 2007 di Rumpin, Bogor. TNI AU mengklaim tanah warga sebagai lokasi latihannya. Akibatnya pada 22 Januari 2007 terjadi bentrok TNI AU dengan warga yang mengakibatkan 7 orang luka-luka, satu diantaranya luka tembak serta 4 warga yang diserahkan ke polisi setelah sebelumnya mengalami penyiksaan dari aparat TNI AU.

Penutup

Kebijakan dari rezim SBY-Kalla sekarang ini merupakan cerminan dari watak aslinya. Janji-janji kala kampanye dan setelah menjadi presiden dan wapres terbukti sudah banyak sekali diingkari. Maka dalam momentum ini, SPI menyatakan bahwa selama Reforma Agraria seperti yang dimandatkan dalam konstitusi RI dan UUPA 1960 tak dijalankan maka langkah bagi pembangunan di Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi, prostitusi, dan tingginya perempuan buruh migrant. Pada akhirnya masalah-masalah mendasar kerakyatan di lapangan yakni kelaparan, pengangguran, kurang pendidikan, masalah kesehatan dan terutama kemiskinan akan terus menghantui bangsa kita.

Oleh sebab itu kita butuh solusi yang berani dan luar biasa, sehingga pelaksanaan Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33, merupakan agenda yang mendasar bagi Indonesia untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan sistem agraria nasional yang sejati demi keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan agenda ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi dengan alasan apapun!

Selanjutnya juga harus ditegakkannya Hak-hak asasi Petani dan dijalankannya Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan pertanian dan pangannya sendiri, untuk melindungi dan mengatur produksi pertanian domestik dan perdagangan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, menentukan jumlah yang dapat dipenuhi sendiri dan membatasi pasar lokal dari produk-produk dumping. Kedaulatan pangan tidak menegasikan perdagangan, tetapi justru mempromosikan perumusan kebijakan-kebijakan perdagangan yang melayani hak-hak rakyat atas keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan produksi secara ekologis.

Jakarta, 03 Januari 2008  
Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI

# Petani Melawan Pemanasan Global

Serikat Petani Indonesia (SPI) dan anggota La Via Campesina lainnya yang datang dari berbagai negara menyeru kepada seluruh petani di dunia untuk melawan keputusan Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang hanya mengedepankan kepentingan pasar. Mereka menilai keputusan yang diambil dalam konferensi itu sama sekali tidak berpihak pada kepentingan petani. Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian aksi Solidarity village for a cool planet yang digelar di Nusa Dua Bali dari tanggal 7-10 Desember 2007.

Celso Barbosa, petani anggota MST dari Brasil yang juga tergabung dalam La Via Campesina menyatakan, para petani di Brasil telah dipinggirkan oleh perusahaan internasional yang beroperasi di negara tersebut. Dia menuturkan, kondisi petani di Brasil tidak kalah sengsara dari petani di negara berkembang lain akibat beroperasinya perusahaan internasional. Saat ini salah satu perusahaan internasional raksasa bahkan tengah menyebarkan bibit jagung transgenik di tempat yang sudah dilarang.

"Kami, para petani di Brasil, melawan perusahaan besar itu bagaikan melawan raksasa yang sangat kuat. Mari kita saling mendukung. Kami minta dukungan La Via Campesina di seluruh dunia untuk melawan ketidakadilan ini," kata Celso di Nusa Dua, Bali.

Namun petani MST akhirnya berhasil merebut tanah mereka, meski harus hidup di tenda-tenda selama berbulan-bulan. "Perusahaan Sigenta telah menanam jagung transgenik secara ilegal di Guaso. Pada 2006 konferensi di Panama memutuskan La Via Campesina Brasil akan mengambil alih tanah yang telah diambil alih Sigenta," ujar Celso.

Sedangkan Hyoon Geun Soon dari Korea



Selatan. Mengemukakan perubahan iklim dan kelangkaan pangan diakibatkan oleh sistem industri yang merusak lingkungan dan pasar bebas yang mengakibatkan pangan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Transnasional. Hal itu memunculkan kekhawatiran akan terjadi rawan pangan di Korea.

Kekhawatiran akan kelangkaan pangan juga terjadi di negara Eropa. Olave Randen, anggota La Via Campesina yang berasal dari Norwegia ini mengaku khawatir akan terjadi kelaparan di negaranya. Karena negaranya berada di kawasan dingin yang selalu di lapi oleh es dan salju. "Perubahan iklim yang terjadi pastinya juga berimbas kepada kami. Karena selama ini hidup kami tergantung dari pasokan makanan dari negara selatan yang saat ini juga akan dilanda krisis pangan. Di negara kami juga suplai makanan dipegang oleh perusahaan transnasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum SPI yang sekaligus juga Koordinator Umum La Via Campesina, Henry Saragih, mengungkapkan, Konferensi Perubahan Iklim di Bali masih berorientasi pasar. Konsep jual beli karbon dinilai sebagai akal-akalan sistem ekonomi negara industri yang terbukti merusak ekosistem. "Karena itu, kedaulatan pangan sangat diperlukan," katanya.

Menurut Henry, petani menolak semua sistem penanaman hutan dengan jenis yang seragam (monoculture) yang menyebabkan bumi semakin panas. "Jika ini diterapkan, UNFCCC tidak ada artinya. Negara berkembang seperti Indonesia dipaksa mengutangkan kembali hutannya dengan tanaman industri."

Kaum tani juga menyerukan menentang segala keputusan

Konferensi Perubahan Iklim yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dan mendahulukan kepentingan perdagangan sebagai solusi perubahan iklim.

#### Kegiatan SPI

SPI dan perwakilan La Via Campesina dari seluruh dunia menggelar berbagai kegiatan berkenaan dengan konferensi PBB tersebut. Pada hari Sabtu 8 Desember 2007, SPI dan La Via Campesina bergabung dalam aksi bersama masyarakat Bali di lapangan Renon, Denpasar. Aksi yang disebut sebagai parade budaya untuk keadilan iklim ini menampilkan berbagai bentuk kesenian dari tradisional hingga rock and roll. Parade itu diharapkan bisa memberi suara alternatif di tengah gegap gempita Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Nusa Dua.

Nusa Dua SPI dan La Via Campesina mengadakan aksi tetrikal kekejaman perusahaan internasional terhadap petani dan masyarakat adat. Mereka membuat rantai lingkaran manusia sebagai simbol bumi yang di dalamnya terdapat petani yang ditindas perusahaan internasional. Dalam aksi itu digambarkan para petani akhirnya bersatu menyelamatkan bumi dari perubahan iklim akibat produksi emisi negara industri.

Selain itu, digelar juga pengadilan rakyat terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan dan kekuatan neoliberal. Forum-forum diskusi dan tukar pengalaman juga digelar setiap hari di Nusa Dua.



# Menapaki Pertanian Tradisional Bali

Sepanjang jalan dihiasi dengan berbagai macam tanaman yang umumnya didominasi oleh tanaman padi sawah yang menghijau membuat setiap mata yang memandang tak enggan untuk beralih pandang. Para petani terlihat sibuk membajak, menanam, menyiangi, memanen dan mengairi sawahnya.

Di atas bukit bukit kecil tepatnya, di Desa Jati Luwi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, rombongan petani dari La via Campesina yang datang dari Afrika, Eropa, Amerika Selatan, Asia Tengah, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, Timor Leste, Kamboja, Malaysia, Nepal, India dan Srilanka serta rombongan petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) asyik menikmati suasana alam. Rombongan ini datang untuk melihat lebih dekat pola bertani para petani sawah khususnya di desa Jati Luwih yang menggunakan sistem Subak, (Sistem pengairan sawah yang dikendalikan oleh kelompok). Sistem itu mengairi sawah anggotanya seluas 303 ha.

Uniknya, bagian hilir didahulukan mendapatkan pengairan disusul bagian hulu. Rata-rata ketinggian air menggenangi sawah sekitar 2 cm per petak sawah.

Salah satu petani desa Jati Luwih, yang bernama Pekase yang juga adalah tokoh adat di desa itu sekaligus pengurus subak. Ditengah tengah kesibukannya sebagai petani, ia masih sempat menerima rombongan dan juga menemani rombongan menuju area pesawahan. Pada umumnya petani di Jati Luwih menggunakan pupuk organik dan sedikit menggunakan pupuk urea hanya sebagai pemicu saja.

Menurut penjelasan dari Pekase, padi yang ditanam adalah padi Jendana yang berumur 5 bulan dan juga padi lokal yang terbagi dalam 2 jenis yaitu beras merah dan putih, dengan rata rata hasil panen 7 ton gilingan untuk beras merah dan 5-6 ton / ha untuk beras putih. Pupuk organik didapat dari kotoran ternak dan juga dari jerami yang ditimbun kembali dalam petak sawah.

Sistem kepemilikan sawah dikuasai oleh penduduk asli dan tidak dapat diwariskan kepada pihak luar. Dan ritual adat masih sangat kental dan juga sangat berperan bagi masyarakat Bali umumnya dan lebih khusus bagi warga Desa Jati Luwih dalam setiap kegiatan. Ini terlihat jelas pada proses pengerjaan sawah mulai dari mencari air sampai pada penyimpanan hasil panen.

“Aturan-aturan ini di buat oleh kelompok subak bukan pemerintah, karena pemerintah hanya tahu teori di atas kertas saja, prakteknya mereka sama sekali tidak tahu,” ungkap Pekase.

Sistem pertanian berpacu pada “*Buku Dharma Pemaculan*” yang berisi tentang pengairan, penanaman, panen dan juga pengusiran hama. Serta masih menggunakan sistem tradisi, bila sudah tidak bisa diatasi maka kembali diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, demikian lanjut Pekase.

Marselinus Moa

